

Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

A.Diba Dina Fachrini

*Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara
Fisip Universitas Mulawarman*

Abstract: *The aim of this article is to describe about the degree of participation of society in handling rubbish prolem and environment cleanness in Samarinda. The rubbish problem always becomes the actual issue in its relations to the development activity, in particular for urban areas. The study finds out that participation of society in handling the rubbish was good and right level.*

Keywords: *Society participation, rubbish, environment cleanness*

Abstrak: *Artikel bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu. Permasalahan sampah selalu aktual dalam hubungannya dengan aktivitas pembangunan, khususnya di wilayah perkotaan tempat dimana masyarakat kota bermukim dan sebuah kecamatan pun harus terlihat bersih dari sampah dengan penanggulangan sampahnya mengikutsertakan peranan masyarakat didalamnya. Hasil temuan dalam penelitian ini meliputi, Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu. Pengelolaan sampah dengan baik dan benar.*

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Sampah, Kebersihan Lingkungan*

Pendahuluan

Perkembangan penduduk merupakan salah satu perubahan dan sekaligus merupakan masalah yang menonjol dalam studi kependudukan. Gerak penduduk yang memadati kota-kota pada negara-negara sedang berkembang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Akibat dari gejala tersebut dimana kota menjadi pusat dari banyak kegiatan formal, baik pemerintahan, perdagangan industri maupun jasa. Oleh sebab itu pemerintah dituntut untuk dapat menyediakan dan memberikan pelayanan yang optimal demi memenuhi kebutuhan warganya, salah satunya pelayanan dibidang kebersihan lingkungan. Tingginya tuntutan intensitas pelayanan mengharuskan pemerintah selalu berhadapan dengan persoalan kebersihan, terutama masalah sampah, lajunya produksi sampah pada umumnya lebih cepat dari upaya penanganannya, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Selain itu, pelaksanaan pembangunan di setiap daerah tidak hanya mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan saja, tetapi juga mengacu pada lingkungan hidup

yang baik, sehat dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan pada lingkungan hidup yang baik tersebut, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masalah sampah dan kebersihan lingkungan.

Tingginya tuntutan intensitas pelayanan mengharuskan pemerintah selalu berhadapan dengan persoalan kebersihan, terutama masalah sampah, lajunya produksi sampah pada umumnya lebih cepat dari upaya penanganannya, hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah.

Selain itu pelaksanaan pembangunan di setiap daerah tidak hanya mengacu pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan saja, tetapi juga mengacu pada lingkungan hidup yang baik, sehat dan berwawasan lingkungan. Dalam upaya meningkatkan pada lingkungan hidup yang baik tersebut, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masalah sampah dan kebersihan lingkungan.

Masalah sampah berkaitan erat dengan kebersihan lingkungan, sedangkan kebersihan lingkungan itu sendiri adalah merupakan wujud nyata dari program pembangunan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Hal ini dimaksudkan agar lingkungan tersebut lestari (tidak tercemar) oleh berbagai kejadian yang ditimbulkan oleh ulah manusia dengan segenap aktivitasnya.

Dampak yang ditimbulkan dari bahaya atau gangguan sampah yaitu terjadinya pencemaran udara seperti bau busuk, menyumbat parit sehingga timbul banjir, pencemaran air tanah, sarang lalat, tikus, kecoa, dan jasad renik yang dapat menjadi perantara atau sumber penyakit serta mengganggu keindahan lingkungan. Dalam hal dampak bahaya dari gangguan sampah yang bisa berakibat terhadap terserangnya penyakit dapat mengancam kesejahteraan hidup manusia, kondisi kehidupan yang biasanya tenang dan nyaman terganggu kesejahteraan manusianya dikarenakan terjadinya serangan penyakit yang ditimbulkan oleh gangguan sampah.

Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman (Departemen Pekerjaan Umum) telah mengembangkan suatu sistem manajemen persampahan Indonesia. Sistem tersebut menyajikan suatu metode menyeluruh pengelolaan persampahan yang terdiri atas subsistem organisasi, subsistem teknik operasional, subsistem pembiayaan, subsistem pengaturan dan komponen peran serta masyarakat. Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup bagi daerah-daerah perkotaan terutama bagi daerah-daerah yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan industri ataupun sebagai wilayah pemukiman, menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Masalah serupa juga terjadi di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda yang saat ini sedang giat-giatnya pembangunan, yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Samarinda dengan pusat pertumbuhan sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor antara lain perdagangan, pemukiman, dan perkantoran. Jadi sebagai Kecamatan yang memiliki hasil perdagangan dan pembangunan tidak terlepas dari masalah sampah lingkungan khususnya mengenai masalah kebersihan lingkungan. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah Samarinda mengeluarkan peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah Kota Samarinda yang merupakan perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 Tahun 1987 tentang penertiban sampah dan kebersihan lingkungan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Samarinda mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 ini di kecamatan yang ada di seluruh Samarinda. Diharapkan dengan sosialisasi Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 ini dapat mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota metropolitan berbasis industri, perdagangan dan jasa yang maju, berwawasan lingkungan yang hijau, bersih, dan sehat dari sampah yang dilakukan dengan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu yang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah daerah, masyarakat dan usaha secara proposional, efektif, dan efisien.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M.Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).

Partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu: Partisipasi langsung, Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang

dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Masyarakat

Adanya berbagai wujud kesatuan kolektif manusia menyebabkan bahwa kita memerlukan istilah-istilah seperti halnya istilah “masyarakat”. Masyarakat istilah yang dalam bahasa inggrisnya disebut “society” (berasal dari kata Latin “socius”, yang berarti “kawan”) ini paling lazim dipakai dalam tulisan-tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari untuk menyebut kesatuan-kesatuan hidup manusia. Masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa Arab “syaraka”, yang artinya “ikut serta, berperan serta”.

Max iver dan page (dalam Soejono Soekanto 1961 : 5) mengatakan bahwa masyarakat ialah suatu sistem dari kebijakan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Sedangkan menurut Ralp Linton (dalam Soejono Soekanto 1936 : 91) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Mengenai peranan masyarakat tentang kebersihan lingkungan secara umumnya memandang kebijakan pemerintah antara masyarakat dengan suatu kesatuan yang sistemnya akan berkesinambungan apabila kebijakan pemerintah membuat peraturan daerah dengan ketentuan-ketentuannya dijalankan dan dipatuhi oleh semua masyarakatnya yang dituangkan dalam bentuk Perda Tahun 1987 Jo No.02 Tahun 1992.

Sampah

Dalam upaya umat manusia untuk maju dan berkembang, hidup dan untuk mempertahankan kehidupan di muka bumi, sering kita rasakan atau adanya keberhasilan. Tetapi di samping itu pula adanya kegagalan atau kerusakan dan hal-hal negative lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soetoyono (1989 : 116) bahwa “ manusia memandang dirinya berada di dalam dan terhubung dengan dunia, dengan segala Sesuatu yang berada di muka bumi, di dalamnya segala makhluk hidup dan benda mati, alam sekitarnya dan alam bebas (atmosfir), di dalam suatu makrokosmis di mana manusia berada dan terkandung sebagai mikrokosmis”.

Dari beberapa pengertian sampah di atas cukup memberikan gambaran pemahaman kepada kita apa itu sampah. Dan pemahaman tersebut juga sangat tergantung kepada siapa yang memandangnya dan dalam hal apa yang menjadi sasaran tinjauannya. Sebagai kesimpulan dari pengertian tersebut diatas, peneliti merumuskan pengertian sampah yaitu sampah merupakan sisa-sisa bahan sebagai hasil perlakuan manusia atau bukan (peristiwa alami), yang bersifat organik atau anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dibuang agar tidak memberikan pengaruh negatif pada dirinya dan lingkungannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif, dimana dalam hal ini penulis menggambarkan keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala yang lain. Sehingga memperoleh gambaran yang bersifat deskriptif, mendalam, dan alamiah mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Samarinda Ulu. Dipilihnya lokasi penelitian ini karena memiliki beberapa keunikan. Kecamatan Samarinda merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur yang menjadi pusat pertumbuhan yang berkembang dan pembangunannya cukup pesat. Adanya keterbatasan waktu dan biaya maka peneliti mengadakan penelitian dengan lokasi situs penelitian pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda yang terdiri dari, Institusi pelaksana, Daerah pelayanan, Teknis operasional pelayanan, Alokasi dana.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian seperti instansi terkait dan masyarakat yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda. Karena Penelitian ini adalah Diskriptif Kualitatif yang mana Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dan key informannya, yaitu staf dinas kebersihan dan pertamanan, camat dan masyarakat yang berada di kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dalam Partisipasi masyarakatnya untuk penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda.

Selain menggunakan data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang berhubungan dengan masalah persampahan dalam penanggulangannya dan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh bahan-bahan penelitian dari buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah

Berpijak dari kondisi yang ada, untuk memecahkan masalah sampah harus melihat pola penanganan yang ada saat ini. Dengan demikian pada titik mana dari mata rantai pembuangan sampah tersebut dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga sampah yang masuk ke TPA pada akhirnya hanya berupa sampah yang benar-benar tidak dapat diolah kembali, misalnya sampah B3 (beracun, berbau dan berbahaya) yang langsung masuk pembakaran sampah (insenerator) yang ada di TPA.

Masalah sampah yang ada di Kecamatan Samarinda Ulu dapat dipecahkan dengan baik apabila peran aktif masyarakat meningkat. Mengupayakan agar sampah di kelola, dipilah dan diproses tahap awal mulai dari timbunan sampah itu sendiri (dalam hal ini mayoritas adalah lingkungan rumah tangga). Upaya ini setidaknya dapat mengurangi timbunan sampah yang harus dikumpulkan dan diangkut ke TPS sehingga bebannya menjadi berkurang.

Pada fase awal di tingkat rumah tangga setidaknya diupayakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik dipilah serta dikumpul menurut jenisnya sehingga memungkinkan untuk di daur ulang. Program pengelolaan sampah berbasis komunal ini secara pasti akan memotong mata rantai distribusi sampah dari TPS ke TPA.

Didalam pembangunan terdapat dua pihak yang harus ada di dalamnya, yakni pemerintah di satu sisi dan masyarakat di sisi lain, yang masing-masing membawa peran berbeda. Perbedaan ini adalah pemerintah sebagai administrator public, Gerl (dalam Islamy, 1997 : 11) memeberikan gambaran tentang adanya tiga macam perbedaan administrator yaitu sebagai birokrat, sebagai pemain politik dan sebagai profesionalis, yang kesemuanya merupakan aktor-aktor yang terlibat di dalam proses kebijakan yaitu : perumusan, implementasi dan evaluasi sedangkan masyarakat biasanya sebagai pihak dikenai kebijakan, atau keberadaannya sebagai obyek yang sekaligus sebagai subyek dan penerima manfaat dari suatu kebijakan dalam kegiatan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam penanggulangan sampah sangatlah penting. Dikarenakan permasalahan sampah selalu berada dalam lingkungan sekitar mereka. Sehubungan dengan peran yang dimainkan oleh pemerintah itu, maka di dalam kegiatan pembangunan di bidang lingkungan khususnya pada pembangunan di bidang kebersihan terutama kebersihan di bidang persampahan, dimana Pemerintah Daerah Samarinda dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan, melaksanakan penanganan kebersihan dengan system manajemen persampahan, dimana system ini mempunyai 4 (empat) aspek utama yang saling terkait yaitu : aspek institusi pelaksana, daerah pelayanan, tingkat pelayanan, teknis operasional pelayanan. Adapun pembahasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Institusi Pelaksana

Untuk penanganan masalah sampah di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, dilakukan secara terpadu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam penanganan pengangkutan sampah secara khusus dilakukan oleh DKP dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA) adapun sampah yang diangkut berasal dari pemukiman, pasar, jalan-jalan protokol, restoran dan tempat-tempat umum lainnya.

Dalam penanganan kebersihan lingkungan selain bekerjasama dengan bagian Ketertiban Umum, DKP juga bekerja sama dengan Dinas PU untuk melaksanakan kebersihan di berbagai tempat. Hal yang menjadi kendala tentang koordinasi ini adalah ketidak mampuannya Pemerintah Daerah Samarinda dalam menangani masalah sampah lebih intensif.

Pemerintah Daerah Samarinda Khususnya Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda hanya mengkoordinir masalah sampah pada daerah atau wilayah tertentu saja hal ini terbukti dengan pelayanan langsung yang diberikan kepada wilayah pasar yang menjadi prioritas utama pelayanan. Kantor Dinas Kebersihan dalam hal ini langsung turun lapangan untuk penertiban sampah sedangkan wilayah lainnya seperti pemukiman dilakukan pelayanan tidak langsung bahkan ada daerah yang tanpa pelayanan disebabkan adanya kendala petugas untuk mengangkut sampah disebabkan daerah yang padat penduduk yang susah di lewati oleh petugas kebersihan.

Jadi julukan untuk Kota Samarinda yaitu sebagai Kota yang Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman, dengan melihat penanggulangan kebersihan di Kecamatan Samarinda Ulu agaknya perlu ditinjau ulang sebab untuk kerapian saja Pemerintah Daerah Samarinda masih belum maksimal dalam mengurus permasalahan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan walaupun Petugas Kebersihan telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan.

Namun seyogyanya Institusi ini masih harus dibenahi baik secara structural, fungsi dan personalnya. Dari kelemahan yang ada itu dapat dikatakan belum dapat memberikan pelayanan yang sepenuhnya kepada masyarakat secara memuaskan.

Teknis Operasional

Untuk masalah operasional dalam penanganan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan masih terdapat beberapa kekurangan seperti adanya tingkat produksi sampah yang setiap bulannya terus meningkat, sedangkan tidak semua sampah bisa terangkut. Adanya keterbatasan jumlah sarana dan prasarana persampahan yang ada hal ini harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dalam hal ini DKP.

Daerah Pelayanan

Kecamatan Samarinda Ulu seluas 22,12 km² dimana sebagian wilayah tersebut merupakan daerah rawa/semak belukar yang meliputi daerah hunian

/pemukiman, perkantoran, terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah penduduk 138.780 jiwa.

Pada saat ini pelayanan angkutan sampah yang dilakukan oleh DKP di Kecamatan Samarinda Ulu bekerjasama dengan Camat, RT atau Lurah setempat dilakukan dengan tiga cara yaitu: Di daerah pemukiman yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu dilakukan pelayanan tidak langsung yaitu pengumpulan sampah dan pengangkutan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sampah yang di koordinir oleh RT/RW/Lurah. Di daerah non pemukiman, dilaksanakan pelayanan langsung yaitu pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah. Sisa sampah yang belum terangkut pada malam hari, dilaksanakan pada pagi sampai dengan siang hari.

Jadi dalam hal ini tingkat layanan yang diberikan oleh DKP dalam menangani permasalahan sampah masih dirasakan sangat kurang walaupun pihak DKP sendiri telah berusaha dengan sebaik mungkin.

Alokasi Dana

Dana yang telah direalisasikan untuk proyek kebersihan lingkungan. Sumber pendanaan bagi DKP Kota Samarinda bersumber dari APBD Kota Samarinda yang berupa anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran yang sudah terealisasi di pergunakan untuk pembiayaan kebersihan lingkungan dan penanggulangan sampah seperti halnya yaitu pembiayaan pembersihan parit, selokan, pembayaran gaji atau upah para petugas kebersihan, biaya penambahan alat-alat berat untuk pengangkutan sampah, penambahan tempat-tempat sampah, dan container.

Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda

Pentingnya peran serta masyarakat dalam hal penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan bukan semata-mata kekurangmampuan institusi pengelola kebersihan dan upaya menanggulangi masalah persampahan, melainkan secara konsepsual, masyarakat merupakan variable dominan dalam system persampahan.

Untuk mewujudkan agar masyarakat dapat berperan serta dalam suatu kegiatan pembangunan, misalnya di bidang kebersihan tidak terlepas dari dua hal yang saling bertentangan, yakni hal yang bersifat positif (kepatuhan) dan negative (ketidak patuhan) yang senantiasa mempengaruhi jiwa bertindak terhadap suatu aturan/hukum/norma. Faktor utama dalam pencapaian tujuan penanganan kebersihan adalah faktor manusia baik petugas kebersihan maupun masyarakat, maka untuk dapat membantu usaha institusi pengelola kebersihan dalam mengelola sampah, antara lain dilakukan upaya untuk membiasakan masyarakat akan sikap dan tingkah laku yang didasari oleh kesadaran masyarakat akan lingkungna yang bersih, tidak lagi didasarkan keharusan atau kewajiban, tetapi lebih di sadari pada nilai kebutuhan.

Berdasarkan kepatuhan dan ketidak patuhan yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penanggulangan sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Samarinda ULu Kota Samarinda umumnya masih ada di antara warga masyarakat yang belum mematuhi peraturan yang ada, masih ada masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan. Peran serta masyarakat di Kecamatan Samrinda ULu Kota Samarinda terhadap masalah persampahan ternyata masih kurang. Kesadaran akan llingkungan yang bersih dari permasalahan sampah kurang mereka perhatikan.

Seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi data penelitian ada beberapa hal yang menjadi penyebab rendahnya oeran serta masyarakat di kecamatan samrnda ulu adalah adanya faktor kebiasaan membuang sampah di sembarang tempat, keenganan untuk membuang sampah ke TPS yang telah tersedia. Walaupun tempat sampah yang telah disediakan namun perhatian masyarakt unutk membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu tidak terlihat kesan untuk melakukan hal tesebut, tidak disipilannya membuang sampah (waktu yang telah di tentukan), akibatnya tempat sampah terlihat selalu penuh padahal petugas sendiri telah mengangkut sampah pada pagi hari.

Selain itu malasnya untuk membuang sampah pada tempat yang telah di sediakan karena letaknya dianggap jauh, padahal menurut penulis letak TPS yang disediakan oleh petugas kebersihan tidak pernah jauh dari lingkungan tempat tinggal. Bagi masyarakat yang bermukim di hunian yang padat seperti di daerah cendana dan antasari begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di gang-gang kecil biasanya di sediakan TPS bata. Namun TPS Bata yang di sediakan memang jumlahnya terbatas terkadang dalam satu jalan yang terdiri beberapa gang hanya tersedia satu TPS saja. Padahal jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan tersebut banyak.

Seperti yang dijelaskan pada deskripsi penelitian, yang memotivasi petugas kebersihan agar lebih giat dalam melaksanakan pekerjaannya salah satunya adalah pemberian insentif. Namun pemberian insetif atau gaji amsih dirasakan kurang dan tentunya hal ini kurang menunjang keefektifan para petugas kebersihan. Selain itu Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda telah bekerja sama dengan dokter DKK Kota Samarinda yang bertempat di lingkungan DKP untuk memberikan pengobatan secara Cuma-Cuma kepda karyawan/karyawati sertab para petugas kebersihan. Jadi untuk pelayanan kesehatan kepada para petugas kebersihan telah mengalami peningkatan walaupun dalam hal ini masih saja terdapat kekurangannya. Namun adanya pemeberian pelayanan kesehatan ini menurut penulis sangat mendukung sekali mengingat pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas kebersihan tersebut membutuhkan teanaga, serta fisik yang kuat dan kesehatan yang lebih baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Sampah Dan Kebersihan Lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda terdiri : Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan mengelola sampah dan kebersihan lingkungan di Kecamatan Samarinda Ulu adalah warga yang tinggal atau menetap di lingkungan Kecamatan Samarinda Ulu di 8 kelurahan yaitu masyarakat yang berada di kelurahan Teluk Lerong, Kelurahan Jawa, Kelurahan Dadi Mulya, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Bukit Pinang.

Dari luas Kecamatan Samarinda Ulu 22,12 Km² daerah yang hanya mendapatkan pelayanan ± 475,80 Km² sedangkan sasaran target dari DKP adalah ± 610 Km² berarti DKP sebagai institusi pelaksana dalam kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari pelayanan penertiban sampah dan kebersihan lingkungan yang telah dilakukan oleh DKP maka dapat diadakan tingkatan-tingkatan pelayanan yang dibagi mulai dari tingkat pelayanan yang intensif, pelayanan menengah, pelayanan rendah, daerah yang tidak mendapatkan pelayanan sampah, daerah yang mendapatkan pelayanan langsung. Daerah yang tidak dapat mendapatkan pelayanan ini dikarenakan alasan daerah daya kepadatan penduduk yang rumahnya susah untuk dilalui oleh petugas kebersihan.

Secara teknis penanganan/pengelolaan operasional persampahan meliputi kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pembuangan akhir dan pengelolaan sampah proses ini satu sama lainnya saling mempengaruhi. Produksi atau volume sampah dan pembuangan akhir dan pengelolaan sampah proses ini satu sama lainnya saling mempengaruhi.

Produksi atau volume sampah yang merupakan timbunan sampah setiap bulannya terus mengalami peningkatan, sarana dan prasarana sampah yang banyak mengalami kerusakan terutama tempat pembuangan sampah (TPS) seperti jenis TPS Bintang yang perlu diganti, penyebabnya selain kurangnya dana yang ada juga karena akibat dari musibah banjir, kebakaran, pemasangan pipa PDAM, terkena pelebaran jalan.

Saran

Untuk lebih meningkatkan penanganan kebersihan kearah yang lebih optimal, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat maka di bawah ini dikemukakan saran-saran Agar penertiban sampah dapat berjalan dengan lancar maka penulis menyarankan Pemerintah Daerah Samarinda dalam hal ini Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) untuk itu diperlukan kerjasama dengan berbagai instansi salah satunya dengan pihak swasta, jika perlu permasalahan sampah tersebut pihak swasta

saja yang menanganinya dengan tidak terlepas dari peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Samarinda.

Dalam hal pemberian pelayanan angkutan sampah kepada masyarakat kota Samarinda penulis menyarankan agar seluruh daerah Samarinda mendapatkan layanan angkutan sampah dengan cara membagi jumlah tenaga operasional untuk setiap daerah jadi dalam hal ini jumlah petugas kebersihan harus ditambah.

Secara teknis operasional penanganan permasalahan penertiban sampah saling berkaitan, penulis menyarankan untuk mengurangi besarnya produksi sampah maka, dari DKP agar menyediakan dan memperbanyak sarana pengumpul sampah baik berupa TPS, container, bintong dan juga sarana alat angkut sampah. Dalam hal penertiban sampah dan kebersihan lingkungan dana yang ada dirasakan masih kurang oleh karena itu diharapkan agar DKP lebih berupaya untuk mendapatkan alokasi dana.

Daftar Pustaka

- Danusaputro, Munandjat. *Hukum Lingkungan, Buku V Sektoral jilid 5*, Bandung: Binacipta.
- Dun, N, William. 1999. *Analisis kebijaksanaan publik*, Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Fuad, Amsyari. *Prinsip-prinsip masalah pencemaran lingkungan*, Jakarta: Ghalia Indonesia Jakarta.
- Mustopdidjaya. 1994. *Studi Kebijakan Perencanaan dan Penerapannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM, Universitas Pers.
- Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 *Tentang Penertiban sampah dan Kebersihan Lingkungan*.
- Poerwadarminta, W,J,S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Cetakan Pertama, pustaka Pelajar.
- Quade, S.Edgar. 1975. *Analisis Untuk Keputusan Publik*, Amerika: American, Publishing Co.
- Salim, Emill. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta: Cetakan Kedua LP3ES, Salindeho, John, 1993.
- Soemarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Cetakan Keempat Djambatan.
- Soenarko, H, SD. 2000. *Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya: Cetakan Kedua, Airlangga University Press Surabaya.
- Soetiyono. 1989. *Manusia Dalam Pengelolaan*, Jakarta: Ghanesha.
- Suryaningrat, Bayu. 1989. *Kebijaksanaan Dan Koordinasi Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.